

KATEGORI

Lingkungan Hidup

SUB KATEGORI

Sampah

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Sarana pengumpulan Sampah/Tinja dan Keadaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Banyaknya sarana pengumpulan sampah/tinja dan keadaan sampah** adalah jumlah peralatan yang digunakan untuk dalam kegiatan penanganan sampah dan produk buangan saluran pencernaan serta kondisi sampah yang ada.
- **Sarana** Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
- **Pengumpulan** adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
- **Sampah** adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
- **Tinja** atau **feses** adalah produk buangan saluran pencernaanyang dikeluarkan melalui anus atau kloaka.
- **Keadaan sampah** adalah kondisi sisa kegiatan manusia yang berupa dalam kegiatan penanganan sampah.

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

UKURAN

Ton

UNIT

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah sarana pengumpulan sampah dan tinja serta keadaan sampah diwilayah tersebut.

INTERPRETASI

Apabila suatu wilayah memiliki banyak sarana pengumpulan sampah/tinja maka penanganan terhadap sampah/tinja menjadi lebih maksimal. Apabila terdapat sedikit sarana pengumpulan sampah/tinja yang dimiliki suatu wilayah maka penangananan sampah/tinjda diwilayah tersebut kurang maksimal.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Lingkungan Hidup

DOKUMEN

DDA

